



Kemenkes
BKK Merauke



RENCANA KERJA TAHUNAN Tahun 2026

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN
KELAS II MERAUKE



www.bkkmerauke.com



kkpmrk@gmail.com



082199224855 / (0971) 330263

KATA PENGANTAR

Dalam kerangka perencanaan pembangunan nasional, tahun 2025 menandai dimulainya pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 serta Rencana Strategis Kementerian Kesehatan pada periode yang sama. Tahap awal pembangunan ini berlangsung dalam konteks transisi pemerintahan hasil Pemilihan Umum, yang secara langsung berimplikasi pada penajaman arah kebijakan serta penyesuaian program pembangunan nasional guna mendukung pencapaian visi dan misi Presiden terpilih. Kondisi tersebut menuntut seluruh kementerian dan lembaga untuk memperkuat sinergi kebijakan serta memastikan kesinambungan pembangunan melalui perencanaan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil.

Sebagai bagian integral dari penyelenggaraan pembangunan kesehatan nasional, Kementerian Kesehatan berkewajiban menerjemahkan agenda prioritas pemerintah ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang terukur. Dalam hal ini, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan kesehatan wilayah, khususnya melalui penguatan sistem kewaspadaan dini terhadap potensi ancaman kesehatan masyarakat yang dapat berdampak lintas wilayah maupun lintas negara. Oleh karena itu, keselarasan perencanaan antara tingkat pusat dan unit pelaksana menjadi faktor kunci dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah dan tangkal terhadap masuk atau keluarnya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, serta pos lintas batas darat negara. Kompleksitas dinamika mobilitas manusia dan barang menuntut adanya sistem pengawasan yang andal, respons yang cepat, serta koordinasi lintas sektor yang efektif guna meminimalkan risiko kedaruratan kesehatan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke menyelenggarakan fungsi yang mencakup penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran; pelaksanaan pengawasan serta pengendalian terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan atau lingkungan; pelaksanaan upaya pencegahan dan respons terhadap kejadian kesehatan masyarakat; penyediaan pelayanan kesehatan pada kondisi kegawatdaruratan dan situasi khusus; penegakan ketentuan di bidang kekarantinaan kesehatan; pengelolaan data dan informasi; penguatan jejaring, koordinasi, dan kemitraan lintas sektor; pelaksanaan bimbingan teknis; serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja secara berkelanjutan.

Sejalan dengan kebutuhan tersebut, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 menjadi langkah strategis dalam memastikan keterpaduan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program. Dokumen ini berfungsi sebagai instrumen manajerial yang memberikan arah kebijakan sekaligus pedoman operasional bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Melalui Rencana Kinerja Tahunan ini diharapkan seluruh program dan kegiatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke dapat dilaksanakan secara terencana, terintegrasi, terukur, dan berorientasi pada kinerja, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta memperkuat sistem pertahanan kesehatan nasional. Selain itu, dokumen ini menjadi landasan dalam penyusunan Program Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Tahun 2025 serta sebagai acuan dalam proses pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi.

Merauke, 15 Januari 2026
Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas II Merauke




Syarif Abubakar Katili, S.H., M.Si.
NIP 197305161997031004

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Struktur Organisasi.....	3
C. Sumber Daya Manusia.....	7
BAB II Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.....	9
A. Visi.....	9
B. Misi.....	9
C. Tujuan Strategis.....	11
D. Sasaran Strategis.....	11
E. Rencana Kegiatan.....	11
BAB III Penutup.....	16
A. Pemanfaatan Rencana Kinerja Tahunan.....	16
B. Pemantauan Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kerangka penguatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kinerja, perencanaan memiliki peran fundamental dalam memastikan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan instrumen penting dalam siklus perencanaan yang berfungsi sebagai penjabaran operasional dari Rencana Aksi Kegiatan lima tahunan, sekaligus menjadi penghubung antara perencanaan strategis dan implementasi program. Penyusunan RKT mengacu pada Rencana Aksi Program tingkat eselon I serta Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, sehingga terwujud keterpaduan kebijakan, program, dan kegiatan pada seluruh tingkatan organisasi.

Rencana Aksi Kegiatan lima tahunan memberikan arah strategis bagi manajemen dan seluruh unsur organisasi dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, keberadaan RKT yang disusun secara sistematis, terukur, dan adaptif menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2025–2029 dapat dimonitor dan dievaluasi secara lebih operasional. Melalui perencanaan tahunan yang berkualitas, organisasi tidak hanya mampu mengendalikan pelaksanaan program, tetapi juga dapat mengantisipasi dinamika lingkungan strategis serta merumuskan langkah langkah percepatan guna meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran organisasi.

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke memiliki posisi strategis dalam menjaga keamanan kesehatan wilayah, khususnya pada pintu masuk negara yang rentan terhadap risiko penularan penyakit dan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kompleksitas mobilitas manusia, alat angkut, dan barang menuntut kesiapsiagaan institusi dalam memperkuat sistem deteksi dini, meningkatkan kapasitas respons, serta memastikan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan berjalan secara optimal.

Sejalan dengan visi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke, yaitu “Mewujudkan Pelabuhan, Bandara, dan Pos Lintas Batas Darat

Negara yang Bebas dari Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan,” seluruh kebijakan dan program diarahkan untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat serta mendukung ketahanan kesehatan nasional. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan deteksi dini dan respons terhadap penyakit serta faktor risiko kesehatan.
2. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan pengawasan alat angkut di pelabuhan, bandara, dan Pos Lintas Batas Darat Negara.
3. Mewujudkan tata kelola organisasi yang efektif, bersih, dan akuntabel.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas.

Sebagai bentuk komitmen terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke menyusun Rencana Kerja Tahunan Tahun 2026 guna mendukung pencapaian lima indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dokumen ini berperan sebagai instrumen manajerial dalam mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar selaras dengan sasaran strategis organisasi, sekaligus sebagai alat pengendalian untuk memastikan pemanfaatan sumber daya dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam rangka mengoptimalkan peran sebagai penanggung jawab penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk negara, penyusunan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2026 mengacu pada Rencana Aksi Kegiatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke Tahun 2025–2029. Keterpaduan antara perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan diharapkan mampu menghasilkan implementasi program yang terarah, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta memperkuat sistem pertahanan kesehatan nasional secara berkelanjutan.

B. Struktur Organisasi

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke berlokasi di Jalan Prajurit Nomor 01, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan kekarantinaan kesehatan pada pintu masuk negara guna mencegah masuk dan keluarnya penyakit serta faktor risiko kesehatan masyarakat.

Berdasarkan struktur organisasi, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke terdiri atas:

1. Kepala Balai
2. Kepala Subbagian Administrasi Umum
3. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Instalasi



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas II Merauke

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, telah ditetapkan susunan tim kerja

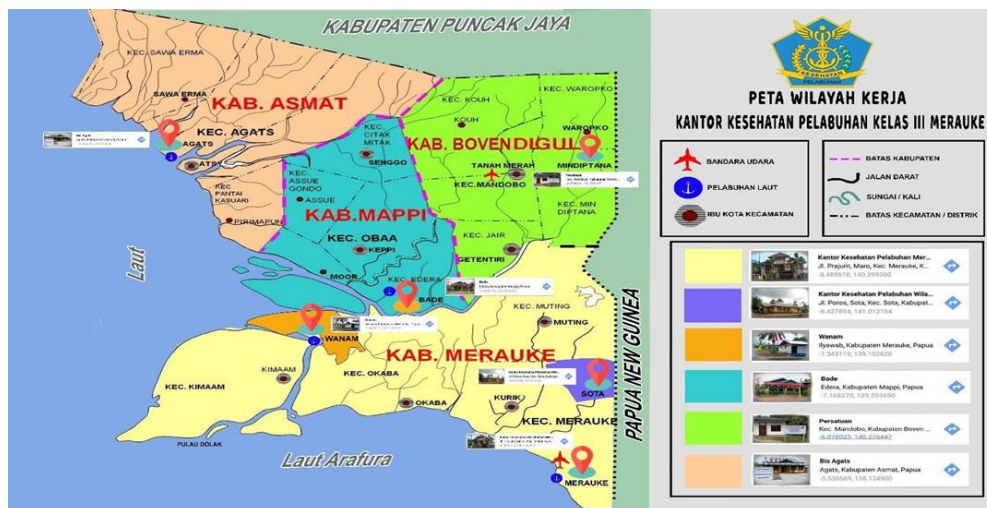
yang menjadi penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Tim kerja tersebut terdiri atas lima kelompok, yaitu:

1. Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan yang didukung oleh jabatan fungsional epidemiolog.
2. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang yang didukung oleh jabatan fungsional epidemiolog.
3. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan yang didukung oleh jabatan fungsional entomolog, sanitarian, dan jabatan pelaksana.
4. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan Situasi Khusus yang didukung oleh jabatan fungsional dokter, perawat, analis laboratorium, serta jabatan pelaksana.
5. Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas yang didukung oleh jabatan fungsional pranata komputer, arsiparis, dan jabatan fungsional lainnya.

Setiap tim kerja memiliki tugas menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk mendukung pencapaian target kinerja, melakukan pembagian peran antar anggota, memperkuat koordinasi lintas tim, melaksanakan pemantauan dan evaluasi sesuai substansi tugas, menyusun laporan kegiatan, serta menyampaikan laporan kepada pimpinan. Seluruh tim kerja bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, dibentuk wilayah kerja yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Wilayah kerja merupakan unit operasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan. Selain itu, kelompok jabatan fungsional berperan memberikan pelayanan profesional sesuai dengan keahlian masing masing guna menjamin mutu penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Kabupaten Merauke merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Selatan yang terletak pada posisi geografis antara 137° sampai dengan 141° Bujur Timur dan 6° sampai dengan 9° Lintang Selatan, dengan luas wilayah sekitar 45.071 km². Sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah. Secara geografis, Kabupaten Merauke berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan berdekatan dengan Australia, sehingga memiliki tingkat mobilitas lintas negara yang cukup tinggi dan menuntut penguatan sistem kewaspadaan kesehatan.



Gambar 1.2 Peta Wilayah Kerja BKK Kelas II Merauke

Balai Kekarantina Kesehatan Kelas II Merauke memiliki wilayah kerja yang tersebar pada beberapa kabupaten di Provinsi Papua Selatan, yaitu:

1. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Agats

Terletak di Kabupaten Asmat dan dapat ditempuh melalui jalur udara sekitar satu jam atau jalur laut sekitar 48 jam. Wilayah kerja ini didukung oleh tiga sumber daya manusia yang terdiri atas perawat ahli pertama, epidemiolog ahli pertama, dan entomolog kesehatan terampil. Gedung kantor merupakan milik Kementerian Kesehatan dan berdiri di atas lahan milik KSOP Agats.

2. Wilayah Kerja Pelabuhan laut Bade

Berlokasi di Kabupaten Mappi dan dapat dijangkau melalui penerbangan selama kurang lebih 45 menit atau perjalanan darat selama enam jam yang dilanjutkan dengan speedboat sekitar empat jam. Wilayah kerja ini didukung oleh tiga personel yang terdiri atas entomolog ahli pertama, perawat terampil, serta tenaga kebersihan. Gedung dan lahan kantor merupakan aset Kementerian Kesehatan.

3. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Wanam

Terletak di Kabupaten Merauke dan dapat ditempuh melalui jalur udara sekitar 45 menit atau jalur laut sekitar 36 jam. Wilayah kerja ini didukung oleh dua personel yang terdiri atas perawat pelaksana dan tenaga kebersihan. Status gedung kantor masih berupa sewa bangunan.

4. Wilayah Kerja Pos Lintas Batas Darat Sota (PLBD)

Berlokasi di Kabupaten Merauke dengan jarak tempuh sekitar 80 km atau 1,5 jam perjalanan darat. Wilayah kerja ini didukung oleh dokter ahli pertama, pranata laboratorium kesehatan terampil, sanitarian pelaksana, serta tenaga kebersihan dan keamanan.

5. Wilayah Kerja Bandar Udara Mopah

Bandar Udara Kelas I Mopah merupakan salah satu simpul transportasi utama yang menghubungkan Merauke dengan berbagai kota di Indonesia. Bandara ini dilayani oleh maskapai nasional serta penerbangan perintis dan penerbangan militer. Pengawasan kekarantina kesehatan dilaksanakan setiap hari oleh petugas dari kantor induk guna memastikan terpenuhinya standar kesehatan pada lalu lintas penumpang dan barang.

6. Wilayah Kerja Pos Lintas Batas Darat Yetetkun

Berada di Distrik Ninati, Kabupaten Boven Digoel, dengan jarak sekitar 524 km atau kurang lebih 12 jam perjalanan

darat. Pos lintas batas ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini serta termasuk dalam kategori Pos Lintas Batas Negara terpadu yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Wilayah kerja ini didukung oleh satu orang sanitarian ahli pertama.

7. Pos Bandara Tanah Merah

Terletak di Kabupaten Boven Digoel dan dapat ditempuh melalui perjalanan darat sekitar delapan jam dengan jarak kurang lebih 422 km. Pos ini didukung oleh dua orang personel yang terdiri atas epidemiolog ahli pertama dan perawat terampil

8. Pos Pelabuhan Laut Merauke

Berlokasi di Kabupaten Merauke dengan jarak tempuh sekitar 10 menit dari kantor induk. Pengawasan dilaksanakan setiap hari oleh petugas yang dijadwalkan secara bergiliran dari kantor induk.

C. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu.

Jumlah SDM (pegawai) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke per 31 Desember 2025 sebanyak 59 orang yang terdiri dari PNS: 30 orang, P3K: 6 orang, dan outsourcing: 19 orang. Rincian jumlah pegawai PNS sebagai berikut :

a. Berdasarkan Jabatan

No	Uraian Jabatan	Jumlah
1	Jabatan Struktural	2 orang
2	Jabatan Fungsional Umum	5 orang
3	Jabatan fungsional tertentu	29 orang
	Jumlah	36 orang

b. Berdasarkan Tingkat dan Jenis Pendidikan

No	Uraian Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	Dokter	3 orang
2.	Apoteker	1 orang
3.	Ners	2 orang
4.	S2 Ilmu administrasi	1 orang
5.	S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat	3 orang
6.	S1 Kesehatan Masyarakat	6 orang
7.	S1 Ekonomi	3 orang
8.	S1 Administrasi Negara	1 orang
9.	D – IV Kesehatan Lingkungan	1 orang
10.	S1 Sosial Politik	1 orang
11.	D-III Analis Kesehatan	1 orang
12.	D-III Kesehatan Lingkungan	5 orang
13.	D-III Perawat	5 orang
14.	S-III Teknologi Laboratorium Medis	1 orang
15.	D-III Manajemen Informatika	2 orang
	Jumlah	36 orang

c. Rincian Tenaga Outsourcing berdasarkan alokasi penerimaan sebagai berikut:

No	Uraian Jabatan	Jumlah
1	Sopir	2 orang
2	Satpam	4 orang
3	Petugas kebersihan	13 orang
	Jumlah	19 orang

d. Distribusi ASN berdasarkan wilayah kerja

No	Uraian Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	Kantor Induk	25 orang
2.	Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Asmat	2 orang
3.	Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Bade	2 orang
4.	Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Wanam	1 orang
5.	Wilayah Kerja PLBD Sota	2 orang
6.	Wilayah Kerja Bandara Mopah	1 orang
7.	Wilayah Kerja PLBD Yetetkun/Pos Bandara Tana Merah	3 orang
	Jumlah	36 orang

Distribusi pegawai di kantor induk sebanyak 25 orang, hal ini disebabkan karena di wilayah Merauke selain Pelabuhan Laut Yos Sudarso, Pelabuhan Laut Perikanan Nusantara, Pelabuhan Pertamina dan Pelabuhan Kelapa Lima juga terdapat pelabuhan rakyat diantaranya adalah : Pelabuhan Gudang arang, Pelabuhan Cikombong, Pelabuhan Sidomulyo, Pelabuhan Kumbe, dan pelabuhan rakyat lainnya.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi

Visi Presiden Republik Indonesia adalah Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, selaras dengan visi tersebut, Kementerian Kesehatan menetapkan visi Tahun 2025-2029 yakni Masyarakat Yang Sehat Dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit (P2) menetapkan visi selaras dengan visi Kementerian Kesehatan yakni Populasi bebas penyakit mendukung Masyarakat yang Sehat dan Produktif guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Balai Kekarantinaan Kesehatan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Ditjen P2 menetapkan visi yang sejalan dengan visi Ditjen P2 yakni **Pintu Masuk serta bandara dan pelabuhan domestik yang bebas dari penularan penyakit dan faktor risiko penyakit berpotensi KLB/wabah.**

B. Misi

Kementerian Kesehatan melaksanakan Misi (*Asta Cita*) Presiden dan Wakil Presiden Periode 2025-2029 terutama pada Asta Cita nomor 4, yaitu *“memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”*. Asta cita tersebut dituangkan dalam RPJMN 2025-2029 sebagai Prioritas nasional (PN) ke-4 dalam RPJMN. Untuk mendukung PN 4 pada RPJMN dan mewujudkan Visi Kementerian Kesehatan Periode 2025-2029, maka ditetapkan Misi Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup
2. Membudayakan gaya hidup sehat
3. Memenuhi layanan kesehatan yang berkualitas, baik, adil, dan terjangkau
4. Mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsive
5. Memperkuat tata Kelola dan pendanaan kesehatan nasional yang berkecukupan, adil dan berkelanjutan

6. Mengembangkan teknologi kesehatan yang maju
7. Mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien

Untuk menunjang pencapaian Misi Kementerian Kesehatan, maka Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit menetapkan misi yaitu :

1. Menjamin ketersediaan layanan penanggulangan penyakit yang bermutu, merata, dan berkeadilan di seluruh tingkat pelayanan kesehatan.
2. Meningkatkan kapasitas individu dan komunitas dalam penerapan gaya hidup sehat dan pengelolaan faktor risiko penyakit.
3. Memperkuat program imunisasi nasional sebagai perlindungan utama terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
4. Mengendalikan risiko lingkungan terhadap kesehatan melalui pengawasan dan peningkatan kualitas sanitasi, air bersih, pengelolaan limbah, dan pengawasan lingkungan berbasis risiko
5. Meningkatkan ketahanan sistem kesehatan dengan mengembangkan sistem surveilans, dan respons cepat terhadap kejadian luar biasa/wabah secara terintegrasi, berbasis data, dan teknologi diwilayah dan pintu masuk negara
6. Meningkatkan akuntabilitas program penanggulangan penyakit melalui Perencanaan berbasis data, Transparansi anggaran dan pelaporan program, Monitoring dan evaluasi berkala dan objektif, Pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan, Penguatan kapasitas SDM dan tata kelola program

Selaras dengan Misi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Balai Kekarantina Kesehatan menetapkan misi yaitu :

1. Memantapkan sistem surveilans, kemampuan deteksi penyakit, pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit berpotensi KLB/wabah
2. Mewujudkan tata kelola pelayanan dan dukungan manajemen kekarantina kesehatan yang bersih dan akuntabel yang didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi.

C. Tujuan Strategis

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi, Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit menetapkan tujuan yaitu :

1. Alat angkut, orang, barang, dan lingkungan bebas dari penularan penyakit dan faktor risiko kesehatan.
2. Terbangunnya sistem respon cepat kegawatdaruratan medik dan rujukan, serta pelayanan kesehatan situasi khusus.
3. Terwujudnya pelayanan kekarantinaan kesehatan yang bersih, akuntabel dan prima
4. Terwujudnya SDM yang unggul dan kompeten serta sarana prasarana sesuai standar dalam bidang kekarantinaan kesehatan
5. Terwujudnya sistem informasi kekarantinaan kesehatan yang terintegrasi, dan interoperable dengan stakeholder terkait.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, maka Kantor Kesehatan Pelabuhan telah menetapkan tujuan strategis Balai Kekarantinaan Kesehatan yakni **Terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100%.**

D. Sasaran Strategis

Untuk dapat mewujudkan tujuan strategis maka UPT bidang kekarantinaan menetapkan sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya kabupaten/kota yang mendeteksi, merespon dan mengendalikan faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah
2. Meningkatnya pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara

E. Rencana Kegiatan

Dalam rangka menjamin tercapainya Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis, maka ditetapkan Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Aksi kegiatan 2025-2029. Adapun perencanaan kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Aksi.

Tabel 2.1
Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (ISS)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	TARGET TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2028	TARGET TAHUN 2029
1	Nilai Kapasits IHR dalam Joint External Evaluation (JEE)							
		Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Negara yang Dikendalikan (96%)	Persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	73%	76%	79%	82%	85%
2	Nilai Reformasi Birokrasi Kemenkes (92,16)							
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkes (78)	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit		78	80	82	85
		Nilai Kinerja Anggaran Kemenkes (92,55)	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit		92,55	92,75	92,95	93,15
		Indeks Penetapan Sistem Merit Kemenkes (0,87)	Indeks Kualitas SDM Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit		82	83	84	85
		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT) (4)	Nilai Maturitas Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit		4	4,05	4,1	4,15

Dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke dalam melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/ atau faktor risiko Kesehatan di wilayah kerja Pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara, maka Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke menetapkan Rencana Kinerja Tahunan dengan target yang harus dilaksanakan/dicapai, adapun indikator dan target tersebut dapat dilihat pada tabel :

Tabel 2.2
Rencana Kerja Tahunan

NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (ISS)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET TAHUN 2026	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1	Nilai Kapasits IHR dalam Joint External Evaluation (JEE)				263.052.000
		Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Negara yang Dikendalikan (96%)	Persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	76%	
2	Nilai Reformasi Birokrasi Kemenkes (92,16)				8.321.222.000
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkes (78)	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit	78	
		Nilai Kinerja Anggaran Kemenkes (92,55)	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit	92,55	
		Indeks Penetapan Sistem Merit Kemenkes (0,87)	Indeks Kualitas SDM Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit	82	
		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT) (4)	Nilai Maturitas Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit	4	
Jumlah					8.584.274.000

Adapun rincian kegiatan berdasarkan KRO/RO dapat dilihat pada tabel :

Tabel 2.3
Kegiatan/KRO/RO dan Pendanaan

NO	Kode	Kegiatan	Tahun 2025		
			Anggaran	Target	Satuan
A.1	7960	Penyelenggaraan Pelayanan Kekearifan Kesehatan	263,052,000		
1	7960.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	230,067,000	146	Layanan
2	7960.QAH.016	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan	31,936,000	2	Layanan
3	7960.QAH.017	Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut	18,746,000	2	Layanan

4	7960.QAH.U02	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di bandar udara	31,680,000	36	Layanan
5	7960.QAH.U04	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus	40,560,000	24	Layanan
6	7960.QAH.U07	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD	8,582,000	7	Layanan
7	7960.QAH.U10	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria	5,448,000	4	Layanan
8	7960.QAH.U15	Layanan survei faktor risiko penyakit TB	49,095,000	9	Layanan
9	7960.QAH.U19	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan	34,320,000	52	Layanan
10	7960.QAH.U20	Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria	9,700,000	10	Layanan
11	7960.RAB	"Sarana Bidang Kesehatan	32,985,000	2	Paket
12	7960.RAB.001	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare	32,985,000	2	Paket
A.2	024.05.WA	Program Dukungan Manajemen	8,321,222,000		
A.3	4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Penanggulangan Penyakit	8,321,222,000		
A.3.1	4815.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	8,321,222,000	1	Layanan
A.3.2	4815.EBA.994	Layanan Perkantoran	8,321,222,000	1	Layanan

Perhitungan pendanaan disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan riil organisasi, prioritas program, serta prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Selain mendukung pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, perencanaan pendanaan juga memperhatikan prakiraan maju guna menjamin kesinambungan program dan stabilitas kinerja organisasi pada tahun-tahun berikutnya. Perhitungan pendanaan dapat dilihat pada tabel :

Tabel 2.4
Perhitungan Pendanaan (Tahun Berjalan dan Prakiraan Maju)

NO	Kode	Kegiatan	Tahun 2026			2027	2028	2029	2027	2028	2029
			Alokasi (Rp)	Target	Satuan	Alokasi (Rp)	Alokasi (Rp)	Alokasi (Rp)	Layanan	Layanan	Layanan
		Program Penanggulangan Penyakit	8.584.274.000			9.442.701.400	10.386.971.540	11.425.668.694			
A.1	7960	Penyelenggaraan Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan	263.052.000			289.357.200	318.292.920	350.122.212			
1	7960.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	230.067.000	146	Layanan	253.073.700	278.381.070	306.219.177	160	176	194
2	7960.QAH.016	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan	31.936.000	2	Layanan	35.129.600	38.642.560	42.506.816	2	1	1
3	7960.QAH.017	Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut	18.746.000	2	Layanan	20.620.600	22.682.660	24.950.926	2	1	1
4	7960.QAH.U02	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di bandar udara	31.680.000	36	Layanan	34.848.000	38.332.800	42.166.080	40	44	48
5	7960.QAH.U04	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus	40.560.000	24	Layanan	44.616.000	49.077.600	53.985.360	26	29	32
6	7960.QAH.U07	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD	8.582.000	7	Layanan	9.440.200	10.384.220	11.422.642	8	9	10
7	7960.QAH.U10	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria	5.448.000	4	Layanan	5.992.800	6.592.080	7.251.288	5	6	7
8	7960.QAH.U15	Layanan survei faktor risiko penyakit TB	49.095.000	9	Layanan	54.004.500	59.404.950	65.345.445	10	11	12
9	7960.QAH.U19	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan	34.320.000	52	Layanan	37.752.000	41.527.200	45.679.920	57	63	69
10	7960.QAH.U20	Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria	9.700.000	10	Layanan	10.670.000	11.737.000	12.910.700	11	12	13
11	7960.RAB	"Sarana Bidang Kesehatan	32.985.000	2	Paket	36.283.500	39.911.850	43.903.035	2	2	2
12	7960.RAB.001	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare	32.985.000	2	Paket	36.283.500	39.911.850	43.903.035	2	2	2
A.2	024.05.WA	Program Dukungan Manajemen	8.321.222.000			9.153.344.200	10.068.678.620	11.075.546.482			
A.3	4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Penanggulangan Penyakit	8.321.222.000			9.153.344.200	10.068.678.620	11.075.546.482			
A.3.1	4815.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	8.321.222.000	1	Layanan	9.153.344.200	10.068.678.620	11.075.546.482	1	1	1
A.3.2	4815.EBA.994	Layanan Perkantoran	8.321.222.000	1	Layanan	9.153.344.200	10.068.678.620	11.075.546.482	1	1	1

BAB III

PENUTUP

A. Pemanfaatan Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan ini agar dimanfaatkan sebagai acuan semua Tim Kerja di Lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke dalam melakukan pelaksanaan kegiatan dan penilaian indikator kinerja pada kurun waktu tahun 2026.

Kegiatan yang dilakukan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke tahun 2026 berdasar pada tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan, dalam pelaksanaannya akan berupaya menurunkan penyakit menular, penyakit tidak menular dan peningkatan kualitas lingkungan di wilayah kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini disusun sedemikian rupa sehingga diharapkan setiap program/kegiatan dapat dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan penyusun laporan kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke.

B. Pemantauan Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan

Pemantauan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana progress dari setiap indikator kinerja. Penilaian setiap indikator kinerja dilihat dari definisi operasional kegiatan, cara perhitungan target dan hasil yang telah dicapai.

Pengumpulan data primer menggunakan spreadsheet, selanjutnya dilakukan rekapitulasi oleh penanggung jawab laporan masing-masing substansi dan dilakukan analisis terhadap target. Pemantauan bulanan menggunakan beberapa aplikasi:

1. Aplikasi pengukuran output dan kinerja anggaran yaitu e-Monev DJA dan e-Monev Bappenas
2. Aplikasi pengukuran nilai IKPA yaitu OM SPAN SAKTI
3. Aplikasi pengukuran capaian kinerja bulanan yaitu e-performance